


Fauzan Afrizal
Intan Novera
Masfufah Zayin Awali
Nafirul Izzah Fajri
Nesa Nur Cahyanti
Yuni Cahyaningratri
Zulfa Nida Khoiriyah



Administrasi **KEUANGAN** **DAN IMPLEMENTASINYA** **DI SEKOLAH**



Editor:
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd,CLSP.

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKOLAH

Fauzan Afrizal
Intan Novera
Masfufah Zayin Awali
Nafirul Izzah Fajri
Nesa Nur Cahyanti
Yuni Cahyaningratri
Zulfa Niða Khoiriyah



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKOLAH

Penulis:
Fauzan Afrizal
Intan Novera
Masfufah Zayin Awali
Nafirul Izzah Fajri
Nesa Nur Cahyanti
Yuni Cahyaningratri
Zulfa Nida Khoiriyyah

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd, CLSP

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi, 60, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCCN : 62-415-4658-609

Cetakan Pertama:
Agustus 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul " Administrasi Keuangan Dan Implementasinya Di Sekolah" ini dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal amanah, kejujuran, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Administrasi keuangan dalam dunia pendidikan bukan sekadar kegiatan mencatat pemasukan dan pengeluaran, melainkan merupakan bagian penting dari tata kelola lembaga pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dalam konteks ini, buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip, prosedur, regulasi, hingga tantangan dalam pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan pendidikan. Lebih dari itu, buku ini juga diharapkan menjadi panduan praktis bagi mahasiswa, guru, tenaga administrasi, kepala sekolah, dan seluruh stakeholder pendidikan dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi keuangan yang efektif dan efisien. buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah di bidang administrasi pendidikan, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan sebagai faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan. Latar belakang penulisan buku ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan keuangan yang terencana, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar mampu menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Penyusunan buku ini didasarkan pada metode studi pustaka yang komprehensif, dengan mengacu pada berbagai literatur akademik, peraturan perundang-undangan, pedoman pengelolaan dana BOS, serta hasil penelitian terbaru yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan isi dari buku ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan konteks kebutuhan satuan pendidikan di Indonesia. Tujuan utama dari buku ini adalah memberikan wawasan, referensi, dan pemahaman yang aplikatif kepada para mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, serta para pengelola lembaga pendidikan mengenai konsep, prinsip, dan praktik administrasi keuangan secara komprehensif. Diharapkan buku ini mampu menjadi salah satu sumber

bacaan yang bermanfaat dalam menunjang studi maupun pelaksanaan tugas profesional di lapangan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan kebaikan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dalam hal cakupan maupun kedalaman materi, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Pengertian Dan Tujuan Administrasi Keuangan.....	3
Bab III Fungsi Dan Prinsip-Prinsip Administrasi Keuangan.....	6
A. Fungsi Administrasi Keuangan.....	6
B. Prinsip-prinsip keuangan dalam Pendidikan.....	8
Bab IV Sumber Keuangan Pendidikan.....	13
A. Pasal 46 UU No.20 tahun 2003,tentang system pendidikan nasional menyatakan: pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.	13
B. Besaran, proses dan alokasi BOS	18
Bab V Prosedur/Proses Administrasi Keuangan.....	26
Bab VI Peran Kepala Sekolah Dan Bendahara.....	32
Bab VII Masalah Dan Tantangan Administrasi Keuangan	42
Bab VIII Strategi Peningkatan Administrasi Keuangan	47
Bab IX Implementasi Administrasi Keuangan: Studi Kasus Di SMP Muhammadiyah Grogol.....	52
A. Struktur Pengelolaan Keuangan	52
B. Sumber Dana dan Alokasi	52
C. Sistem Pencatatan dan Laporan	52
Bab X Kesimpulan	57
Daftar Pustaka	58

BAB I

PENDAHULUAN

Manajemen administrasi keuangan sekolah merupakan suatu manajemen perencanaan dan pengelolaan di dalam sekolah yang memiliki fungsi untuk mengelolaseluruh aktivitas keuangan di dalam suatu sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yaitu menciptakan pengelolaan dan hasil yang efektif dan efisien. Keuangan sekolah memiliki fungsi yang sangat vital dan strategis, karena keuangan sekolah mencakup seluruh aktivitas sekolah seperti halnya pendanaan,fasilitas,renovasi, sarana dan prasarana maupun aktivitas di dalam sekolah lainnya sangat bergantung terhadap keuangan sekolah. Oleh karena itu di dalam pengelolaannya diperlukan sistem manajemen dan administrasi keuangan yang baik guna mencapai tujuan yang efektifdan efisiensertaseluruhaktivitasdi dalam sekolah pun berjalan dengan lancar dan dapat meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam bentuk pendanaan atau keuangan (Akma,2021).

Tujuan utama dari manajemen keuangan sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana, meningkatkan akuntabilitas, serta menciptakan transparansi dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Transparansi di sini bermakna bahwa setiap informasi mengenai sumber dan penggunaan dana harus disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, hingga wali murid. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran (Parida et al., 2021).

Seiring dengan berkembangnya tuntutan pendidikan yang semakin kompleks, pengelolaan keuangan sekolah dituntut untuk lebih adaptif, terbuka, dan sesuai regulasi. Tidak hanya cukup dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga diperlukan analisis, perencanaan jangka pendek

BAB II

PENGERTIAN DAN TUJUAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sekolah menjadi kebutuhan mendesak di era Society 5.0. Purwanto (2021) menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan dapat “mengotomatisasi banyak proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan akurasi serta kecepatan dalam pelaporan keuangan”. Sementara itu, laporan dari Kemendikbudristek pada Desember 2023 mencatat bahwa “84% responden menyadari kemampuan ARKAS mampu menyederhanakan proses dan menghemat waktu untuk tata kelola administrasi keuangan sekolah”. Dengan demikian, adopsi aplikasi seperti ARKAS—terutama versi 4.0 yang sudah terintegrasi dengan SIPLah—bukan pilihan semata, tapi strategi krusial untuk membangun tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien (Adani et al., 2024).

Namun, implementasi teknologi keuangan di sekolah tidak luput dari tantangan. Santi et al. (2024) mengungkap kendala berupa “ketergantungan pada teknologi manual seperti buku besar dan spreadsheet, yang rentan dan kurang efisien” serta keterbatasan kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem informasi (SIM-K). Selain itu, Rita Elfianis (2024) menyoroti bahwa “keterbatasan infrastruktur berupa akses internet lambat dan ketidakstabilan listrik” serta kurangnya pelatihan staf menjadi hambatan utama dalam implementasi ICT di sektor Pendidikan. Oleh karena itu, program pengembangan SDM, peningkatan infrastruktur, serta dukungan kebijakan regulasi sangat diperlukan agar sistem digital dapat berjalan optimal (Nugraha et al., 2025).

Sebagai langkah lanjutan, perlu dirancang strategi terpadu yang melibatkan teknologi, SDM, dan partisipasi publik. Menurut Syahrul Hamdi

BAB III

FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI KEUANGAN

A. FUNGSI ADMINISTRASI KEUANGAN

Administrasi keuangan dalam pendidikan memiliki peranan atau fungsi penting dalam menjamin kelancaran operasional lembaga pendidikan. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, institusi pendidikan dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi penggunaan dana secara efisien dan efektif. Hal ini membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan, serta mendukung kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, administrasi keuangan yang tertib akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, administrasi keuangan yang baik juga berfungsi sebagai alat kontrol dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Setiap pengeluaran dan pemasukan tercatat dengan rapi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, yayasan, maupun masyarakat. Kejelasan dalam pengelolaan dana ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan serta mendorong partisipasi lebih besar dari stakeholder dalam mendukung program-program sekolah. Oleh karena itu, manfaat administrasi keuangan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam pembangunan dunia pendidikan. (Siswadi & Rodiyah, 2022).

Administrasi keuangan dalam lembaga pendidikan juga memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Siswadi dan Rodiyah (2022), administrasi keuangan berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian anggaran. Dengan penyusunan anggaran yang realistis dan terperinci, lembaga pendidikan dapat

BAB IV

SUMBER KEUANGAN

PENDIDIKAN

A. PASAL 46 UU NO.20 TAHUN 2003, TENTANG SYSTEM PENDIDIKAN NASIONAL MENYATAKAN: PENDANAAN PENDIDIKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT.

1. Dana Pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III (tingkat SLA/SLP). Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah (Firdaus et al., 2024).

Pemerintah pusat maupun daerah merupakan sumber utama pendanaan pendidikan di Indonesia. Dana yang diberikan bersifat rutin dan ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional dan non operasional sekolah. Beberapa jenis dana dari pemerintah antara lain:

Dana Rutin melalui Daftar Isian Kegiatan (DIK): Dana ini berasal dari anggaran rutin pemerintah dan disalurkan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar. Penggunaan dana ini sudah ditentukan secara

BAB V

PROSEDUR / PROSES

ADMINISTRASI KEUANGAN

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). RPS terdiri atas rencana strategis (Renstra) dan rencana operasional (Renop). Sesuai dengan PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1, disebutkan bahwa “setiap satuan Pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun”.

UU yang mengatur tentang prosedur atau proses administrasi keuangan dalam pendidikan yang masih berlaku sampai sekarang adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan keuangan pendidikan, termasuk prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

- **Elaborasi:**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi dasar hukum utama dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam undang-undang ini, secara tegas disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 46). Selain itu, dalam Pasal 48 disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB VI

PERAN KEPALA SEKOLAH DAN BENDAHARA

Administrasi keuangan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sekolah yang efektif. Keberhasilan pengelolaan keuangan di sekolah sangat bergantung pada peran kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial dan bendahara sebagai pengelola teknis. Menurut Mulyasa (2004), kepala sekolah memiliki fungsi sebagai manajer yang harus mampu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi semua sumber daya sekolah termasuk keuangan. Sementara itu, bendahara sekolah memiliki peran sebagai pelaksana administratif yang memastikan setiap penggunaan dana tercatat dengan baik dan sesuai aturan. Berikut adalah beberapa peran kepala sekolah dan bendahara dalam administrasi keuangan dalam pendidikan sekolah.

Peran kepala sekolah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran

Kepala sekolah memegang peran penting sebagai perencana anggaran keuangan di satuan pendidikan. Ia bertanggung jawab menyusun dokumen keuangan utama seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang menjadi landasan operasional seluruh aktivitas pendidikan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan anggaran ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, seperti guru, staf administrasi, komite sekolah, dan perwakilan orang tua. Kolaborasi ini penting guna menghasilkan rencana

BAB VII

MASALAH DAN TANTANGAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Administrasi keuangan sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kelancaran operasional dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik, tertib, dan transparan merupakan fondasi utama agar setiap program dan kegiatan di sekolah dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dengan sistem administrasi keuangan yang kuat, sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, meningkatkan mutu layanan, dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak sekolah masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat tercapainya tata kelola keuangan yang ideal. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pencatatan dan pelaporan, tetapi juga meliputi penggunaan dana yang kurang transparan dan terkadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kondisi ini tentu saja berdampak negatif terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Selain masalah yang bersifat internal dan teknis, administrasi keuangan sekolah juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks dari sisi sumber daya manusia dan teknologi. Banyak sekolah masih kekurangan tenaga administrasi yang memiliki kompetensi memadai dalam pengelolaan keuangan modern, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mempercepat dan mempermudah proses pencatatan serta pelaporan. Selain itu, sebagian besar sekolah juga masih bergantung pada sistem manual yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan potensi penyalahgunaan dana semakin besar. Ketergantungan pada sumber dana terbatas dan proses administrasi yang rumit juga menambah beban

BAB VIII

STRATEGI PENINGKATAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Administrasi keuangan memegang peranan krusial dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dalam era transparansi dan akuntabilitas saat ini, pengelolaan keuangan pendidikan dituntut untuk semakin tertib, efisien, dan tepat sasaran. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pelaporan, hingga kurangnya pemahaman terhadap regulasi masih menjadi kendala dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah dan sistematis untuk meningkatkan kualitas administrasi keuangan pendidikan. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai pendekatan strategis yang dapat diterapkan oleh institusi pendidikan guna mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.

1. Faktor yang memiliki dampak besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang penting terhadap kualitas laporan, dan hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa alasan, yaitu: Pemahaman dan pengetahuan, karakteristik teknis, pengelolaan anggaran, pengendalian internal, pelaporan yang tepat waktu dan penerapan teknologi. Dari alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

BAB IX

IMPLEMENTASI

ADMINISTRASI KEUANGAN

A. STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan sekolah dilakukan oleh dua orang bendahara dengan pembagian tugas yang jelas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana BOS, sementara satu staf lainnya menangani aspek teknis dan dokumentasi laporan keuangan. Sistem ini memudahkan koordinasi dan memperkecil risiko kesalahan dalam pelaporan serta pengelolaan dana operasional.

B. SUMBER DANA DAN ALOKASI

Sumber dana utama sekolah berasal dari:

1. **Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah):** Digunakan untuk mendanai kegiatan operasional utama sekolah.
2. **Dana infak siswa:** Sebesar Rp50.000,00 per bulan per siswa, dana ini dikhususkan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti Tahfidz, Tapak Suci, dan Hizbul Wathan.

Penggunaan dana dilakukan berdasarkan alokasi yang sudah dirancang dalam RKAS, meskipun terkadang terjadi penyesuaian karena kondisi dana yang tidak selalu ideal.

C. SISTEM PENCATATAN DAN LAPORAN

Idealnya, pencatatan dilakukan secara bulanan. Namun, dalam praktiknya, beberapa siswa melakukan keterlambatan pembayaran hingga akhir semester atau bahkan menjelang pengambilan ijazah. Hal ini menyebabkan pihak bendahara harus melakukan pengelolaan dana secara

BAB X

KESIMPULAN

Administrasi keuangan merupakan bagian penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan, karena menyangkut perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas dana yang digunakan dalam seluruh aktivitas sekolah. Dari pembahasan Bab I hingga Bab III, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, sehingga seluruh kegiatan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan.

Secara teoritis, administrasi keuangan melibatkan beberapa prinsip dasar, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Fungsi dan perannya tidak hanya sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai alat kontrol, perencanaan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana. Sumber keuangan pendidikan berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah (misalnya dana BOS), masyarakat, orang tua siswa, dan usaha sekolah sendiri.

Di SMP Muhammadiyah Grogol, mengelola dana BOS dan dana infak siswa dengan sistem yang cukup tertata, meskipun dihadapkan pada keterbatasan dana dan keterlambatan pencairan. Peran kepala sekolah dan bendahara sangat sentral dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Selain itu, strategi adaptif seperti pengalihan dana antar pos, serta komunikasi verbal antara pengelola dan kepala sekolah, menjadi solusi praktis dalam menyiasati berbagai kendala.

Dengan demikian, implementasi administrasi keuangan di sekolah tidak hanya mengandalkan teori dan regulasi, tetapi juga membutuhkan kreativitas, fleksibilitas, komunikasi yang baik, serta manajemen risiko yang cermat untuk menjaga kelangsungan operasional sekolah dalam berbagai situasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, S., Ramadhani, D., & Lestari, M. (2024). Transformasi ARKAS 4.0 dalam Tata Kelola Keuangan Sekolah. Jakarta: Kencana
- Akhmad, A., & Azzahra, C.A. (2024). SUPERVISI PENDIDIKAN DALAM MANAJEMEN ADMINISTRASI KEUANGAN SEKOLAH. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Asri, A., Siregar, N. A. N., Liza, S., & Hidayatullah, R. (2024). Pengembangan Sistem Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi Untuk Mendukung Transformasi Society 5.0. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(4), 216-224.
- Barokah, s. a. (2022). "Supervisi Pendidikan Dalam Manajemen Administrasi Sekolah, " *Manajemen Administrasi Sekolah 1*, 398-400.
- Elfianis, R. (2024). Infrastruktur dan Tantangan Digitalisasi Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(1), 77–85.
- Firdaus, F., Putra, M., & Syaifuddin, M. (2024). Mmanajemen akademik dan supervisi pendidikan supervisi sarana prasarana dan keuangan pendidikan. *JKIP*.
- Hamdi, S. (2023). Implementasi Aplikasi ARKAS terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 6(2), 101–113.
- Hikmat, N., Rizki, F. N., & Mulyadi, A. (2025). Strategi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Berbasis Digital: Studi di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 9(1), 35–48.
- [https://sevima.com/strategi-sukses-mengelola-administrasi-keuangan-sekolah-yayasan-pendidika.\(dinsospmpa.banjarnegarakab.go.id\)](https://sevima.com/strategi-sukses-mengelola-administrasi-keuangan-sekolah-yayasan-pendidika.(dinsospmpa.banjarnegarakab.go.id))
- https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/2042/1468/3282?cf_chl_tk=i5LA.ITr22YaChWj8FpFL6Vaj.BdYSLmchAREIxxZ5017463373901.0.1.1zylrNHH9sPftsyO1Rf3ZodCLu0gVOuOSIU6y6W6pI84
- Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* ,1 (2).Sianturi,S.(2024).Analisis Administrasi Keuangan Sekolah di Era Society 5.0. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1039-1047.

- Karyatun,S.(2016).Mengelola keuangan sekolah.*IlmudanBudaya*,40(54).
- Kemendikbudristek. (2023). Laporan Nasional: Evaluasi Penggunaan ARKAS di Sekolah Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Komarlah, N. (2818). Konsep manajemen keuangan pendidikan. Al-Afkar. *Manajemen Pendidikan Islam*, 67-94.
- Kusyudiyanto, N., Santosa, A. B., & Hidayati, D. (2023). Strategi manajemen pembiayaan sekolah swasta dalam menciptakan sekolah unggulan di SMK Muhammadiyah 3 Bandung .*Jurnal Ilmiah Manajemen ,Ekonomi,&Akuntansi(MEA)*,7(2),1834-1857.
- Mulyasa, E. (2004). Manajemen berbasis sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.(2021). Permendikbudristek No.6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Jakarta:Kemendikbudristek.
- Nofiani,D.(2022).*Administrasikeuangandalam perspektif akuntabilita s* .*Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 32–38.
- Nugraha, A., Permana, R., & Wulandari, S. (2025). Pengembangan Infrastruktur Digital untuk Pengelolaan Keuangan Sekolah yang Efektif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 13(1), 25–37.
- Parida, P., Hasibuan, L., Anwar, K., & Rizki, A. F. (2021). Administrasi Sekolah (Administrasi Keuangan, Perlengkapan, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat). *Bedelau: Journal of Education and Learning*, 2(1), 19-33.
- Pramudita, I. D., Julianti, M., Putri, R. E., Ananda, S., & Rodiah, S. (2024). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 7(1), 1-9.
- Purwanto, A. (2021). Sistem Informasi Keuangan Sekolah di Era Society 5.0: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Pendidikan*, 4(3), 189–197.
- Rahmah,N.(2016).Prinsip Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola:JournalofIslamicEducation Management*, 1(1), 73–77. <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.430>
- Renny Mayasari, Shopiana,dan T. J. (2018). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan. *Sabilarrasyad, Vol. III No. 02 Juli – Desember, III(02)*, 79.

- Republik Indonesia.(2003).Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia.(2003). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Rusty Wulaningsih, R. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya.Solusi.
- Salsabila,S.S.,&Handoko,B. (2024). Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekolah: Tinjauan terhadap Kemampuan SDM dengan Rangkap Jabatan pada MIC igitung Kabupaten Bandung Barat.
- Santi, Y., Harahap, L. M., & Suharti, N. (2024). Kendala Digitalisasi dalam Administrasi Keuangan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 11(2), 144–153.
- Saifrizal, M., &Yusuf,Y.(2023). Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler dan AkuntabilitasPelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 di Kota Lhokseumawe.
- Sitohang, E., Gultom, D., & Sinaga, R. (2024). Kompetensi SDM dan Efektivitas Penggunaan ARKAS di SMK Negeri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Manajemen dan Evaluasi Pendidikan*, 8(1), 60–72.
- Syarif,M.(2021).Peranan Kepala Sekolah dan Bendahara dalam Manajemen Keuangan Sekolah. Scribd.
- Sutansyah,L.,& Ramdani, A.(2023).Pembiayaan Pendidikan:Urgensi, Tantangan, dan solusi.
- Tagela,U.(2023). Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.
- Tagela,U.(2022).Administrasi Keuangan Sekolah.SWCU Press.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Tahun 2003).
- Yati,R.(2021).Peranmanajemenkeuangansekolahdidalampendidikan.
- Yulia,R.(2019).Administrasi keuangan sekolah.

Administrasi **KEUANGAN** **DAN IMPLEMENTASINYA** **DI SEKOLAH**



Dalam konteks ini, buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip, prosedur, regulasi, hingga tantangan dalam pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan pendidikan. Lebih dari itu, buku ini juga diharapkan menjadi panduan praktis bagi mahasiswa, guru, tenaga administrasi, kepala sekolah, dan seluruh stakeholder pendidikan dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi keuangan yang efektif dan efisien. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah di bidang administrasi pendidikan, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan sebagai faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan. Latar belakang penulisan buku ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan keuangan yang terencana, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar mampu menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Penyusunan buku ini didasarkan pada metode studi pustaka yang komprehensif, dengan mengacu pada berbagai literatur akademik, peraturan perundang-undangan, pedoman pengelolaan dana BOS, serta hasil penelitian terbaru yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan isi dari buku ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan konteks kebutuhan satuan pendidikan di Indonesia. Tujuan utama dari buku ini adalah memberikan wawasan, referensi, dan pemahaman yang aplikatif kepada para mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, serta para pengelola lembaga pendidikan mengenai konsep, prinsip, dan praktik administrasi keuangan secara komprehensif. Diharapkan buku ini mampu menjadi salah satu sumber bacaan yang bermanfaat dalam menunjang studi maupun pelaksanaan tugas profesional di lapangan.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)
Telp/WA : +62 896-5427-3996



QRGBN :
02-415-4030-603